

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pihak pemerintah daerah dan pihak swasta membentuk suatu hubungan untuk mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di berbagai sektor guna mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi), selain itu juga untuk menjamin keberlanjutan hidup atau taraf hidup masyarakat yang merata dan berkeadilan sosial di dalam suatu daerah (Hanly Fendy D. S., 2019). Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) adalah perkembangan kegiatan atau suatu proses di dalam perekonomian yang menyebabkan masyarakat sebagai salah satu faktor produksi memproduksi barang maupun jasa lalu output produksi tersebut dijual di pasar barang atau jasa hingga ekspor ke luar negeri, hal tersebut dilakukan guna dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat yang ada di suatu daerah (Sukirno, 2017).

Menurut data dari (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022) laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada 5 tahun terakhir menurut pengeluaran, yakni: tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,08%, yakni di tahun 2017 awalnya sebesar 5,46% naik hingga mencapai sebesar 5,54% pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2020 hingga 2021 merupakan titik dimana angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sendiri laju pertumbuhan ekonomi mulai melambat dan justru mengalami penurunan hingga -2,27%, hal tersebut dikarenakan adanya imbas dari pandemi

Covid-19 sepanjang tahun 2020 yang membuat perekonomian di Indonesia terhambat dan mengalami turbulensi ekonomi. Namun di sisi lain, pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mulai membaik dan mengalami trend positif walaupun masih mengalami kontraksi ekonomi, yakni sebesar 3,63%.

Salah satu tolak ukur untuk melihat perkembangan perekonomian di dalam suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat berbagai banyak sektor yang ikut berkontribusi di dalam segi PDRB untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di Provinsi Jawa Timur, diantara lain: sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor konstruksi, dan lain-lain. Berikut data PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Harga Konstan Tahun 2017-2021 pada tabel 1.1 yang ada di halaman berikut.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat dari tahun ke tahun sesuai data yang ada di dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut tidak jauh dari adanya kontribusi dari berbagai sektor terlebih lagi kontribusi dari lima sektor unggulan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lima sektor unggulan tersebut yang ada di Provinsi Jawa Timur, diantara lain: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Sektor Informasi dan Komunikasi. Diantara ke-lima sektor unggulan tersebut, sektor yang memiliki kontribusi paling besar atau yang lebih mendominasi yakni sektor industri pengolahan. Dalam sektor ini memiliki peranan penting untuk meningkatkan PDRB serta meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1
PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	167.360,5	163.799,9	165.951,2	167.630,2	170.558,5
2	Pertambangan dan Penggalian	80.636,3	82.573,5	83.847,1	80.895,8	77.267,9
3	Industri Pengolahan	434.114,1	466.908	498.740,3	488.444,6	504.864,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.599,5	4.499	4.561,1	4.451,8	4.711,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.454,6	1.515,4	1.586,7	1.666,5	1.761,1
6	Konstruksi	136.136,3	145.140,2	153.689,5	148.652,4	152.417,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	273.213,4	290.136,3	307.440,9	289.706,7	312.382,4
8	Transportasi dan Pergudangan	43.835,3	46.712,4	48.471,4	43.466,2	44.547,4
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	79.202,1	85.237,5	91.659,3	83.548,6	86.108,3
10	Informasi dan Komunikasi	84.699,1	90.416,2	97.070,6	106.612,5	113.956,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	38.064,5	39.859,9	41.374,5	41.449,2	42.135
12	Real Estate	25.247,6	26.823,1	28.441,5	29.565,6	30.241,3
13	Jasa Perusahaan	11.486,8	12.308,5	13.128,1	12.180,1	12.466,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	32.369,7	33.730,2	34.984,3	34.848,5	34.948,5
15	Jasa Pendidikan	38.931,6	41.036,2	44.018,9	45.760,1	46.335,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.743,8	10.485,6	11.277,8	12.239,4	12.847,3
17	Jasa lainnya	21.203,5	22.259,6	23.652,2	20.389,2	21.567,1
PDRB		1.482.299,5	1.563.441,8	1.649.895,6	1.611.507,7	1.669.116,9

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, 2021

Pada tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan cukup signifikan yang awalnya sebesar 1.482.299,5 milyar rupiah di tahun 2017 naik hingga sebesar 1.649.895,6 milyar rupiah di tahun 2019. Namun di sisi lain PDRB Provinsi Jawa Timur terlihat justru mengalami penurunan hingga sebesar 1.611.507,7 milyar rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut terjadi dikarenakan pandemi *Covid-19* di sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan pemerintah pusat membuat kebijakan untuk *social distancing*, tidak boleh berkerumun, dan *Work From Home (WFH)* yang memberikan dampak hampir seluruh sektor perekonomian berhenti beroperasi hingga terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran pada karyawan, sehingga hal itu lah yang membuat PDRB Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 38.387,9 milyar rupiah pada tahun 2020. Akan tetapi, pada tahun 2021 PDRB Provinsi Jawa Timur mulai mengalami kenaikan sebesar 57.609,2 milyar rupiah yang membuat PDRB pada tahun 2021 menjadi 1.669.116,9 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan dikarenakan adanya perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Timur di tahun 2021 mulai membaik dan stabil atau bisa disebut pada tahun ini merupakan masa transisi perekonomian setelah terjadinya pandemi *Covid-19* yang melanda negara Indonesia.

Selain itu juga Provinsi Jawa Timur memiliki sektor unggulan yang memiliki kontribusi atau penyumbang PDRB paling besar diantara sektor-sektor lainnya, yaitu sektor industri pengolahan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pada tabel 1.1, penyumbang PDRB terbesar dan menempati peringkat pertama merupakan dari sektor industri pengolahan. Pada tahun 2017 hingga 2021 PDRB sektor tersebut terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, di tahun

2017 sektor ini saja telah menyumbang PDRB sebesar 434.114,1 milyar rupiah dan terus meningkat hingga di tahun 2021 PDRB sektor ini mencapai sebesar 504.864,5 milyar rupiah, dengan kata lain sektor industri pengolahan yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan PDRB sebesar 70.750,4 milyar rupiah atau sebesar 16,3%.

Sektor industri ini sendiri dapat dibilang salah satu sektor yang memiliki peranan yang sangat penting atau utama untuk dapat meningkatkan PDRB yang ada di suatu daerah, serta sektor ini telah dianggap sebagai sektor pemimpin (*the leading sector*) (Arsyad, 2010). Hal itu dikarenakan adanya pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, sehingga sektor industri dinantikan dapat atau mampu mendorong pembangunan di sektor lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, yakni: sektor pertanian dan sektor perdagangan, sehingga nantinya dapat memperluas lapangan pekerjaan yang baru guna dapat meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat di suatu daerah.

Dengan adanya pendapatan serta daya beli masyarakat yang terbilang meningkat menunjukkan jika perekonomian yang ada di suatu daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Sektor industri yang identik dengan industri manufaktur itu sendiri merupakan satu-satunya sektor ekonomi yang dirasa bisa sebagai faktor yang dapat menggerakkan kemajuan dari berbagai sektor-sektor ekonomi yang lainnya dan sekaligus bisa sebagai pendorong perekonomian yang ada di suatu daerah (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018). Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki jumlah industri pengolahan yang bisa dibilang cukup banyak, hal tersebut dibuktikan dengan adanya data pada tabel 1.2 yang ada dibawah ini.

Tabel 1.2**Jumlah Industri Pengolahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2021**

Total	
Tahun	Jumlah
2011	783955
2012	795410
2013	803453
2014	807478
2015	811237
2016	827574
2017	821604
2018	784885
2019	868328
2020	835477
2021	841255

Sumber: Provinsi Jawa Timur dalam Angka (data diolah)

Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2022), Sektor industri pengolahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu: industri besar dan sedang (IBS), serta industri mikro dan kecil (IMK). Jumlah tenaga kerja yang ada di industri besar dan sedang terdiri dari 20 hingga 100 orang atau lebih, sedangkan pada industri mikro dan kecil jumlah tenaga kerja berkisar antara 5 hingga 19 orang. Sektor industri sendiri merupakan salah satu sektor unggulan dan yang paling mendominasi dalam segi penyumbang PDRB terbesar perekonomian yang ada di Jawa Timur, hal itu semua ditandai dengan adanya kinerja industri yang kian membaik setiap tahunnya selain itu juga faktor pendukung lainnya adalah jumlah industri di Jawa Timur yang mengalami peningkatan setiap tahunnya serta memiliki pertumbuhan jumlah industri mencapai di atas 4%. Berdasarkan tabel 1.2 diatas

dapat dilihat bahwa jumlah industri Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2021 mengalami fluktuatif. Sesuai data tersebut pada tahun 2011 sampai tahun 2016 jumlah industri mengalami kenaikan, yang awalnya sebesar 783.955 unit di tahun 2011 dan terus meningkat hingga sebesar 827.574 pada tahun 2016. Namun di sisi lain, pada tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah industri Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuatif.

Sesuai dengan tabel 1.2 diatas jumlah industri pengolahan sendiri yang memiliki peran paling besar berasal dari industri mikro, kecil dan menengah atau yang sering disebut UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan persentase jumlah unit industri kurang lebih sebesar 99% lebih banyak daripada jumlah unit industri besar dan sedang, serta keberadaannya lebih mendominasi di tingkat perekonomian nasional maupun di tingkat daerah. UMKM sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi penyumbang PDB terbesar di tingkat Nasional serta PDRB terbesar di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ekonomi ini memiliki jumlah unit paling banyak dikarenakan dalam segi modal memerlukan modal yang tidak begitu banyak (relatif kecil) dan dalam hal pengelolaan usahanya dianggap lebih sederhana atau tidak ribet serta lebih fleksibel dalam hal aktifitasnya oleh masyarakat umum. UMKM menjadi tumpuan harapan masyarakat karena dianggap lebih mampu bertahan di masa kritis perekonomian oleh sebab itu UMKM dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian daerah maupun nasional (Anugerah & Nuraini, 2021). Peran keberadaan sektor industri terlebih lagi UMKM dinilai sangat penting yang dapat dilihat dari segi kemampuan sektor ini dalam hal meningkatkan perekonomian serta dapat menyerap para angkatan kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga hal tersebut memiliki dampak positif yakni dapat

memperbaiki taraf hidup dengan cara meningkatnya pendapatan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja merupakan penduduk yang tergolong usia kerja dengan minimal usia 15 tahun atau lebih yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, bahkan telah memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan atau yang masih menjadi pengangguran. Sebagai contoh penduduk yang telah memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja adalah penduduk yang mengalami pembatasan jam kerja oleh perusahaan terkait, hal tersebut bisa terjadi karena adanya salah satu faktor penyebab, yakni: suatu perusahaan yang tiap tahun mengalami kerugian atau bisa disebut di dalam segi finansial yang ada di perusahaan tersebut tidak sehat (berada di masa kritis), seperti pada saat pandemi *Covid-19* pada tahun silam. Secara umum dapat dikatakan bahwa sektor industri sendiri memiliki hubungan yang penting dengan angkatan kerja untuk dapat menggerakkan sistem produksi di suatu industri guna dapat meningkatkan kuantitas serta kualitas barang yang dihasilkan dalam masa produksi tersebut (output produksi). Jumlah angkatan kerja yang begitu banyak diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu daerah yang nantinya dapat pemeratakan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar dapat meningkat (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018).

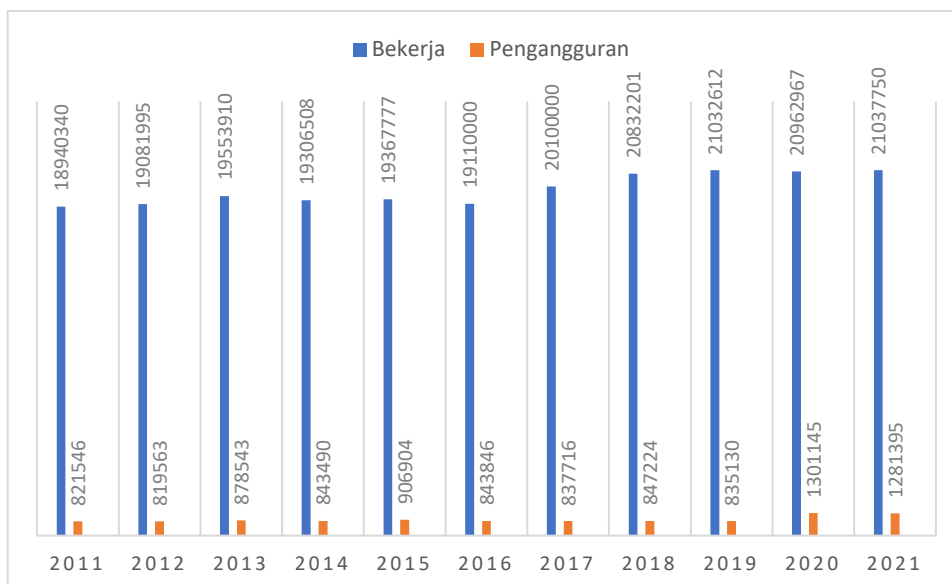
Pertumbuhan ekonomi yang baik dipacu oleh salah satu faktor positif yang mempengaruhinya, yakni: pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar tiap tahunnya akan dapat menambah jumlah tenaga produktif yang ada di berbagai sektor perekonomian, disisi lain,

pertumbuhan penduduk yang lebih besar juga akan dapat menciptakan ukuran pasar domestik yang besar juga.

Penawaran faktor produksi berupa penawaran tenaga kerja merupakan total jumlah keinginan dalam bekerja (jam kerja) yang diberikan oleh seluruh individu yang ingin bekerja (angkatan kerja) yang ada di dalam pasar. Hal ini analogis dengan penjumlahan output atau hasil produksi yang ingin ditawarkan perusahaan dalam industri. Keputusan seseorang individu untuk bekerja berkaitan dengan sejauh mana para angkatan kerja untuk mengalokasikan waktu untuk bekerja dan tidak bekerja (Rahardja P & Manurung M, 2010). Jumlah angkatan kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya data yang ada pada Gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1

Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2021



Sumber: jatim.bps.go.id (Provinsi Jawa Timur dalam Angka) (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas diperoleh data jumlah angkatan kerja Provinsi Jawa Timur periode tahun 2011 hingga tahun 2021 dengan jumlah

angkatan kerja yang cenderung meningkat namun berfluktuatif. Yang awalnya diperoleh data pada tahun 2011 sebesar 19.761.886 orang menjadi 22.319.145 orang di tahun 2021. Namun disisi lain, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Jawa Timur ini sendiri masih tergolong tinggi dan berkisar sekitar 800 ribu hingga 1,3 jutaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yakni: masih kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada sehingga masih banyaknya angkatan kerja yang masih belum terserap secara optimal di berbagai sektor ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dapat dilihat juga pada data diatas jumlah pengangguran terbanyak berada pada tahun 2020 hingga tahun 2021 yakni berkisar sekitar 1,3 jutaan orang, hal tersebut dikarenakan adanya fenomena pandemi *Covid-19* yang melanda tanah air sepanjang tahun tersebut yang mengakibatkan negara Indonesia mengalami depresi ekonomi serta bahkan banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam segi finansial. Sehingga faktor tersebut membuat banyak perusahaan membuat kebijakan untuk membatasi jumlah karyawan atau tenaga kerja (PHK) dan mengakibatkan banyak karyawan yang menjadi pengangguran di masa pandemi pada tahun silam.

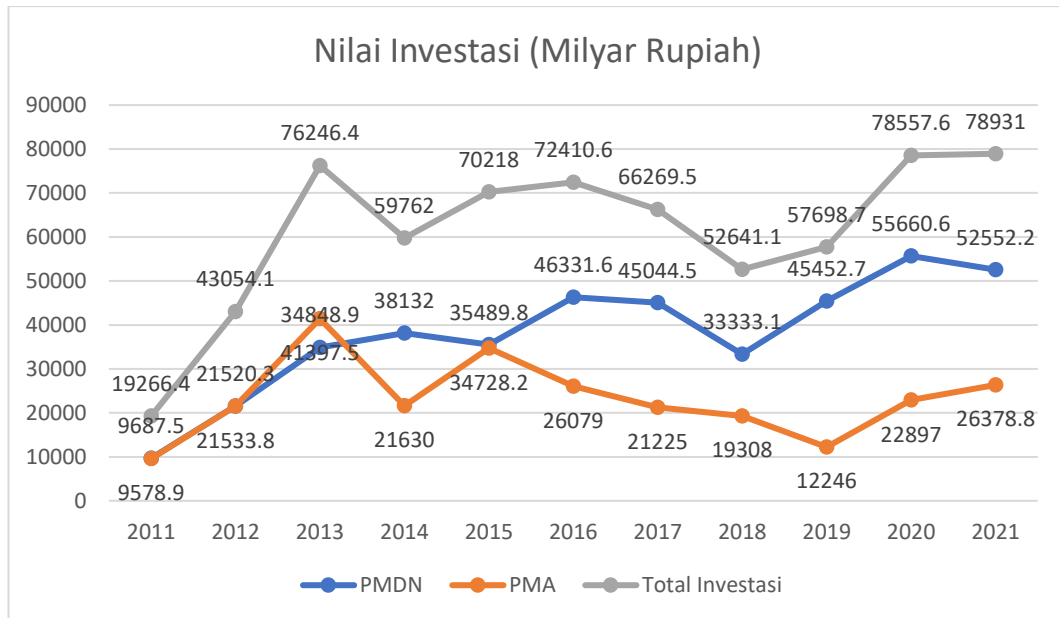
Dikutip dari laman website resmi (merdeka.com, 2020), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerangkan bahwa terdapat penyerapan tenaga kerja yang kian menurun pada sektor industri pengolahan selama masa pandemi *Covid-19* di sepanjang tahun 2020. Kemenperin juga menambahkan hingga per-Agustus 2020 tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan ini hanya mencapai 17,48 juta orang atau hanya sekitar 13,61 persen dari total tenaga kerja dengan tingkat skala nasional, dengan kata lain tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan ini mengalami penurunan yang cukup drastis sejak per-Agustus

2019 di mana tenaga kerja yang diserap bisa mencapai 18,93 juta orang atau sebesar 14,96 persen dari tenaga kerja tingkat skala nasional. Adapun hal tersebut dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia dan berdampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan secara menyeluruh di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.

Secara umum penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: tingkat upah dan investasi. Investasi merupakan penanaman uang atau modal yang dilakukan oleh pihak investor pada suatu perusahaan atau pada pembangunan suatu proyek dengan tujuan diharapkan nantinya pihak investor dapat memperoleh keuntungan dari hasil modal yang ditanam tersebut. Investasi yang tinggi oleh pihak dalam negeri maupun pihak asing yang tinggi diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja akan terus meningkat. Semakin banyak tenaga kerja yang diserap oleh berbagai sektor terutama pada sektor industri pengolahan maka nantinya tingkat pengangguran bisa direduksi, serta dapat terciptanya pemerataan juga meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Disisi lain juga, memungkinkan investasi memberikan dampak positif terhadap pihak emiten maupun masyarakat umum, seperti: terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari negara maju ke negara berkembang yang diharapkan nantinya dapat membantu meningkatkan perekonomian di negara-negara berkembang. Nilai investasi Provinsi Jawa Timur tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Gambar 1.2 yang ada di halaman berikut ini.

Gambar 1.2

Nilai Investasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2021 (Milyar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (data diolah)

Dalam grafik pada Gambar 1.2 di atas menunjukkan nilai investasi Provinsi Jawa Timur dalam rentan waktu 11 tahun terakhir dengan terdapat dua pihak investor, yakni: PMDN dan PMA. PMDN merupakan penanaman modal yang dilakukan di wilayah negara Indonesia oleh pihak investor dalam negeri baik perorangan maupun badan usaha. Sedangkan PMA sendiri merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan ataupun proyek di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh pihak investor asing. Berdasarkan grafik pada Gambar 1.2 tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai total investasi Provinsi Jawa Timur cenderung meningkat namun berfluktuatif. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 nilai total investasi mengalami kenaikan yang awalnya nilai investasi sebesar Rp 19.266,4 Milyar dan terus mengalami kenaikan secara signifikan sebesar Rp 76.246,4 Milyar pada tahun 2013. Sedangkan disisi lain, nilai investasi Provinsi Jawa Timur pada

tahun 2014 hingga tahun 2021 cenderung mengalami fluktuatif dan memiliki nilai total investasi tertinggi sebesar Rp 78.931 Milyar pada tahun 2021.

Dikutip dari laman website resmi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur, 2021), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi berdasarkan laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang tahun 2020. Nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 sebesar Rp 55,7 Triliun, Jawa Barat berada pada peringkat kedua dengan nilai realisasi sebesar Rp 51,4 Triliun, dan disusul tiga provinsi lainnya, yakni: DKI Jakarta, Riau, dan Banten. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan, realisasi PMDN sebesar Rp 55,7 Triliun ditopang oleh investasi yang berada di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan menyumbang nilai investasi terbanyak, yakni sebesar Rp 26,9 Triliun. Disisi lain, realisasi nilai investasi PMA Jawa Timur sebesar Rp 22,6 Triliun ditopang oleh sektor industri kimia dan farmasi yang menyumbangkan nilai investasi sebanyak Rp 8,9 Triliun. Selain itu juga, aliran investasi yang dilakukan oleh PMDN maupun PMA ini juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja (Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), 2019). Menurut Lewis dalam Todaro (2006:132), pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri, dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan output pada sektor modern tersebut. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) ini akan meningkatkan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern.

Menurut Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2020, bahwa secara kumulatif realisasi investasi Indonesia tahun 2020 mencapai sebesar Rp 826,3 triliun atau 101,1% dari target sebelumnya yakni Rp 817,2 triliun dengan rincian realisasi investasi yang paling dominan adalah PMDN sebesar Rp 413,5 triliun (50,1%), serta PMA sebesar Rp 412,8 triliun (49,9%), dan mampu menyerap hingga 1.156.361 TKI dengan total 153.349 proyek investasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 11,85% persen dari pencapaian tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 1.033.835 tenaga kerja. Menteri Investasi/Kepala BKPM, menjelaskan bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja dari pencapaian tahun sebelumnya dikarenakan adanya realisasi investasi sebesar Rp 826,3 triliun pada tahun 2020. PMDN berkontribusi lebih besar daripada PMA, hal tersebut dibuktikan dengan adanya pada era pandemi *Covid-19* peran dari PMDN ini sendiri sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi.

Penyerapan tenaga kerja paling banyak terjadi pada kuartal I-2020, yaitu sebanyak 330.539 orang. Pada kuartal II-2020 penyerapan tenaga kerja adalah sebanyak 263.109 orang. Kemudian, pada kuartal III-2020 sebanyak 295.387 orang, dan sebanyak 294.780 orang pada kuartal IV 2020. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 diikuti oleh peningkatan realisasi investasi pada periode yang sama. Bahlil Lahadalia selaku Kepala BKPM menjelaskan bahwa, penyerapan tenaga kerja pada tahun sebelumnya dibantu oleh tiga strategi yang mendukung, yakni yang pertama, BKPM meminta investor untuk mengalihkan pekerjaan yang dilakukan oleh mesin ke tenaga manusia. Kedua, investasi didorong tidak hanya di sektor teknologi, namun juga padat karya. Terakhir, fokus tidak

hanya diarahkan pada perusahaan besar yang lebih banyak menggunakan teknologi, tetapi pada investor kecil yang membuka banyak lapangan pekerjaan seperti pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Diketahui juga bahwa UMKM sebagai salah satu kegiatan ekonomi penyumbang PDB terbesar di tingkat Nasional serta PDRB terbesar di tingkat Provinsi Jawa Timur.

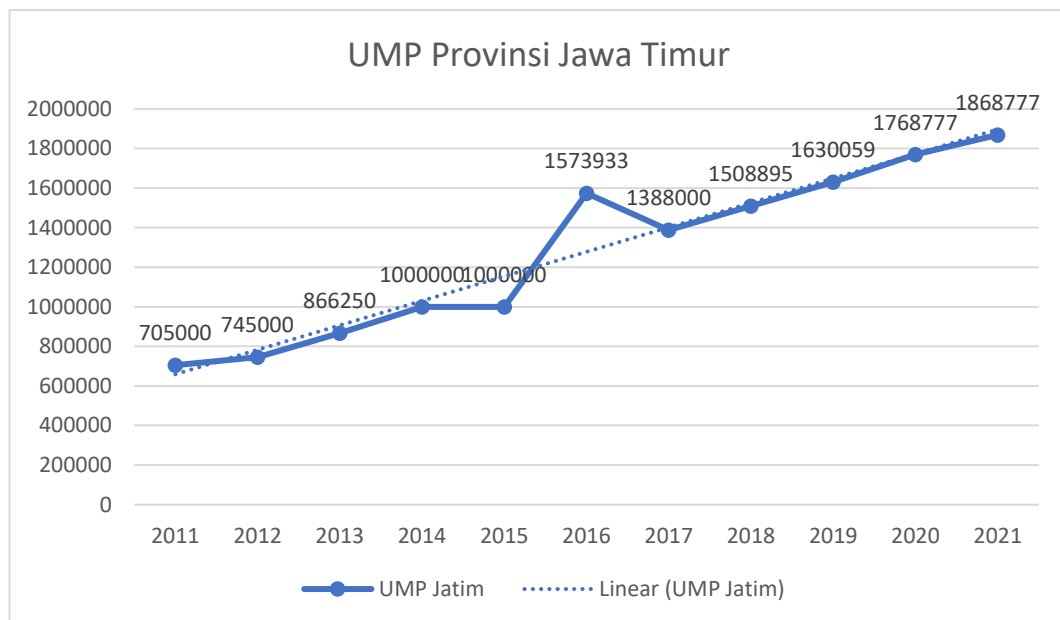
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah atau upah minimum provinsi (UMP), jika pada tingkat provinsi. Semakin besar tingkat upah minimum yang ada pada suatu daerah, maka semakin besar juga pendapatan perkapita serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada pada daerah tersebut. Namun disisi lain juga apabila tingkat upah minimum semakin besar, maka harga bahan-bahan pokok atau biaya hidup juga akan ikut naik seiring dengan adanya penyesuaian tingkat upah pada suatu daerah tersebut. Upah minimum Provinsi (UMP) merupakan tingkat upah atau gaji yang diberikan kepada para tenaga kerja serta kebijakan upah tersebut ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah pada tingkat provinsi. Menurut Pasal 25 PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa kebijakan upah minimum ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Atau dengan arti lain kebijakan upah minimum tersebut ditetapkan tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Penetapan dan kenaikan upah minimum perlu adanya kajian secara cermat dan tepat agar semua pihak baik perusahaan maupun tenaga kerja dapat memperoleh manfaat. Kenaikan upah minimum yang terlalu signifikan akan merugikan perusahaan, dengan kata lain banyak perusahaan akan cabut atau pergi dari daerah yang tergolong upah minimumnya mengalami kenaikan secara

signifikan dan akan memilih opsi untuk pemindahan lokasi perusahaan ke daerah yang tergolong upah minimumnya masih rendah. Sebaliknya juga apabila kenaikan upah minimum yang terlalu rendah tidak dapat menguntungkan tenaga kerja, ini artinya kenaikan upah yang relatif terlalu rendah tersebut dinilai tidak sebanding atau akan kalah oleh adanya inflasi (Lestyasari Devi, 2013). Penetapan kebijakan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur sendiri termasuk kategori rendah dibandingkan dengan UMP dari provinsi lainnya, seperti: Provinsi DKI Jakarta dengan nilai UMP sebesar Rp 4,64 juta di posisi pertama dan Provinsi Papua sebesar Rp 3,65 juta di posisi kedua pada tahun 2022. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 1.3 UMP Provinsi Jawa Timur yang ada dibawah ini.

Gambar 1.3

UMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), (data diolah)

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.3 diatas, menunjukkan data grafik Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2021. Dalam grafik UMP Jawa Timur tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan dan memiliki trend positif di tiap tahunnya. Di tahun 2011 nilai UMP Jawa Timur berada dalam angka Rp 705.000 dan terus mengalami kenaikan sebesar Rp 1.000.000 pada tahun 2014, namun di tahun 2015 nilai UMP Jawa Timur justru tetap dan tidak berubah. Sedangkan di sisi lain, UMP Jawa Timur mengalami penurunan yang awalnya nilai UMP sebesar Rp 1.573.933 di tahun 2016 dan mengalami penurunan hingga menyentuh angka Rp 1.388.000 di tahun 2017, namun UMP Jawa Timur kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan hingga pada tahun 2021 nilai UMP Jawa Timur berada di angka Rp 1.868.777. Maka dapat disimpulkan bahwa UMP Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan atau bisa disebut trend positif dengan nilai trend sebesar 0.097 atau 9,7% per tahunnya.

Suatu negara dapat dikatakan maju dalam segi perekonomiannya ditunjukkan dengan adanya jumlah tenaga kerja di sektor formal yang jauh lebih tinggi dibandingkan di sektor informal, ini dikarenakan terdapat nilai tambah pada sektor formal yang mana tenaga kerja professional dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi serta keterampilan yang telah memadai (Lestyasari Devi, 2013). Kenaikan jumlah tenaga kerja formal sendiri mengikuti kenaikan dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal itu sangat berbeda dan juga berbanding terbalik dengan adanya pernyataan yang diutarakan oleh (Sumarsono, 2009), yakni penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal. Dengan kata lain, kelebihan penawaran tenaga kerja ini nantinya akan lebih

diserap oleh sektor informal yang mana tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi atau tidak adanya penetapan upah minimum, dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“Analisis Kausalitas Antara Variabel Jumlah Industri, Investasi, dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja?
3. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diperoleh beberapa tujuan dari penelitian ini, diantara lain:

1. Untuk menganalisis dan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan kausalitas antara jumlah industri terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Untuk menganalisis dan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan kausalitas antara investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.
3. Untuk menganalisis dan untuk mengetahui terdapat atau tidaknya hubungan kausalitas antara upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk meneliti serta membahas terkait hubungan kausalitas dan hubungan jangka panjang atau jangka pendek yang diperoleh dari hasil penelitian antara variabel sektor industri, investasi, dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2011 hingga tahun 2021 dengan uji kausalitas menggunakan metode *Vector Autoregression (VAR)*.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini diantara lain:

1. Bagi Akademisi dan Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk menambah pengetahuan terkait penelitian serta pemecahan masalah yang sama melalui uji kausalitas bagi para Akademisi, dan juga sebagai koleksi perpustakaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, serta sebagai bahan studi banding penelitian lain terkait topik uji kausalitas.

3. Bagi Peneliti

Kegiatan yang dilakukan dari penelitian ini untuk mendapatkan pengalaman ilmu pengetahuan yang sangat berharga terkait topik yang dibahas guna dapat diterapkan serta dapat dijadikan acuan peneliti untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.